

Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19

Yogyakarta Tourism Recovery Efforts during the Covid-19 Pandemic

Dinar Wahyuni

dinar.wahyuni@dpr.go.id

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

Naskah diterima: 11 September 2021 | Naskah direvisi: 18 November 2021 | Naskah diterbitkan: 31 Desember 2021

Abstract: *The Covid-19 pandemic has paralyzed Yogyakarta's tourism sector. The number of tourist arrivals decreased significantly, followed by a downturn in hotel room occupancy rates. As a result, a number of hotels, restaurants and other tourism businesses have closed either temporarily or permanently. Many tourism industry workers have been laid off. This study examines efforts to restore Yogyakarta tourism during the pandemic, using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, focus group discussions with the Tourism Office, Health Office, the Indonesian Tourism Industry Association and academics in Yogyakarta. It was found that Yogyakarta's tourism recovery is still in the emergency response phase due to the ongoing pandemic. This phase begins with a matching fund approach in which local governments reallocate budgets to mitigation programs and identify impacts on tourism by forming an internal review team. Three strategies to accelerate tourism recovery are carried out through innovation, adaptation, and collaboration. Digital technology development innovations through the Visiting Jogja and Jogja Pass, institutional innovations with the Ngayogyakarta Tourism Synergy, optimizing the promotion of Yogyakarta's new normal tourism, virtual tours, event tourism business matching, and travel corridor arrangements. Adaptation is carried out through communication campaigns for health and safety protocols as well as the implementation of Clean, Health, Safety, and Environment (CHSE) in destinations and the tourism industry. Collaboration is carried out between the central and local governments, tourism actors, the Central Bank of Indonesia, and the private sector. The key to the success of tourism recovery efforts is access and communication between the government and tourism actors.*

Keywords: *CHSE; Covid-19; recovery; tourism*

Abstrak: *Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan sektor pariwisata Yogyakarta. Jumlah kunjungan wisatawan menurun secara signifikan, diikuti penurunan tingkat penghunian kamar hotel. Akibatnya, sejumlah hotel, restoran, dan usaha wisata lain tutup baik sementara maupun permanen. Pekerja industri pariwisata banyak yang dirumahkan. Penelitian ini mengkaji upaya pemulihan pariwisata Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpusat dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan akademisi di Yogyakarta.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan pariwisata Yogyakarta masih berada pada fase tanggap darurat karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. Fase tanggap darurat diawali dengan pendekatan *matching fund* di mana pemerintah daerah merealokasi anggaran ke program mitigasi dan melakukan identifikasi dampak pada pariwisata dengan membentuk tim kajian internal. Tiga strategi mempercepat pemulihan pariwisata dilakukan melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi pengembangan teknologi digital melalui *Visiting Jogja* dan *Jogja Pass*, inovasi kelembagaan dengan Sinergi Wisata Ngayogyakarta, optimalisasi promosi pariwisata *new normal* Yogyakarta, *virtual tour*, *event tourism business matching*, serta *travel corridor arrangement*. Adaptasi dilakukan melalui *communication campaign* protokol kesehatan dan keselamatan serta implementasi *Clean, Health, Safety, and Environment* (CHSE) pada destinasi dan industri wisata. Kolaborasi dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku wisata, Bank Indonesia, serta swasta. Kunci dari keberhasilan upaya pemulihan pariwisata adalah akses dan komunikasi antara pemerintah dengan pelaku wisata. *Monitoring* dan evaluasi penegakan hukum dalam penerapan protokol kesehatan juga mendukung upaya pemulihan pariwisata.

Kata Kunci: CHSE; Covid-19; pariwisata; pemulihan

Pendahuluan

Pada bulan Maret 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 sebagai pandemi global (Arnani, 2020). Hal ini berarti dunia dalam keadaan krisis kesehatan. Setelah hampir 1,5 tahun berlalu, jumlah kasus positif Covid-19 masih mengalami penambahan. World o Meters mencatat sampai dengan 3 September 2021, total kasus Covid-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 220.111.124 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 196.792.250 pasien telah sembuh dan 4.560.134 orang meninggal dunia. Sementara itu, masih ada 18.758.740 kasus aktif yang tersebar di berbagai negara (Shelavie, 2021).

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada krisis kesehatan global. Hampir semua sektor terkena dampak pandemi Covid-19. Sepanjang tahun 2020, perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia tumbuh negatif, bahkan resesi (Purwanto, 2021). Turunnya aktivitas perekonomian dunia dan terbatasnya mobilitas masyarakat pada akhirnya berdampak pada semua sektor termasuk pariwisata. United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak pandemi Covid-19 akan terasa di seluruh

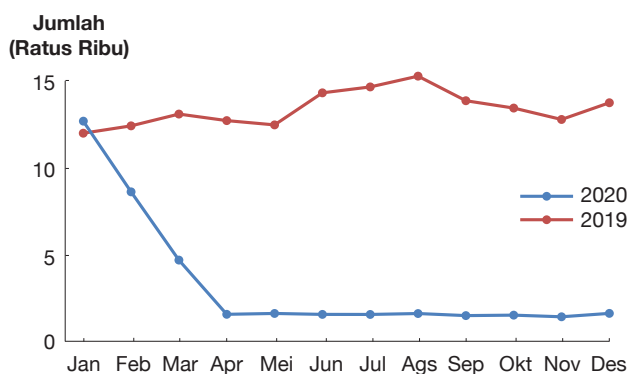
rantai pariwisata. Sekitar 80 persen usaha kecil dan menengah (UMKM) dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian di seluruh dunia terkena dampak Covid-19 (Sugihamretha, 2020: 193).

Dalam perkembangannya, sepanjang Januari hingga Desember 2020, UNWTO mencatat kedatangan wisatawan internasional turun sekitar 1 miliar atau 74 persen antara Januari dan Desember 2020. Pada kuartal pertama 2021, barometer pariwisata dunia UNWTO menunjukkan penurunan sebesar 84 persen. Akibatnya, United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan sektor pariwisata masih akan merugi secara global senilai antara US\$1,7 triliun hingga US\$2,4 triliun dibandingkan tahun 2019 (Lestari, 2021).

Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia. Mewabahnya Covid-19 secara tidak langsung memengaruhi pariwisata di Indonesia. Seperti diketahui bahwa sektor pariwisata telah berkontribusi bagi penerimaan negara melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tahun 2019, realisasi devisa negara dari pariwisata mencapai Rp280 triliun dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5,5 persen (Susanto, 2020). Berdasarkan data Sakernas

2019, sekitar 11,83 persen pekerja Indonesia bekerja di sektor industri pariwisata (Tusianti, 2020, dalam Anggarini, 2021: 23).

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan pariwisata nasional. Jumlah kunjungan wisatawan menurun signifikan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia sepanjang 2020 hanya mencapai 4,02 juta kunjungan, turun sebesar 75,03 persen jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 16,11 juta kunjungan (Badan Pusat Statistik [BPS], 2021). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan 1 berikut.



Bagan 1. Kunjungan Bulanan Wisatawan Mancanegara Tahun 2019 dan 2020

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) RI, 2021a

Bagan 1 menunjukkan jumlah kunjungan wisman tahun 2019 dan 2020. Kunjungan wisatawan mulai menurun pada bulan April 2020. Hal ini seiring dengan keluarnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan PSBB diikuti dengan pembatasan penerbangan serta penutupan sementara tempat wisata, hotel, dan restoran. Kondisi ini terus berlanjut di tahun 2021. Pada kuartal I bulan Januari

sampai dengan Maret 2021, jumlah kunjungan wisman baru mencapai 385.592 kunjungan. Jumlah ini menurun sebesar 85,45 persen dibandingkan kuartal I 2020 yang mencapai 2,65 juta (Herman, 2021).

Penurunan kunjungan wisman diikuti penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel. Pandemi Covid-19 menyebabkan pembatalan rencana perjalanan wisata ke Indonesia yang berarti pembatalan akomodasi juga. Tercatat sepanjang tahun 2020 angka rata-rata TPK di Indonesia hanya mencapai 34,30 persen atau turun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 53,80 persen (Kusumawardhani, 2021). Akibatnya, sejumlah pengusaha hotel menutup hotelnya karena biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan. Selain itu, pandemi Covid-19 juga menyebabkan pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja sehingga pendapatannya pun berkurang. Selama tahun 2020, BPS mencatat sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [Kemenparekraf/Baparekraf], 2021b).

Penurunan kunjungan wisatawan secara signifikan juga berdampak bagi penurunan devisa negara dari sektor pariwisata. Seperti diketahui bahwa sebelum pandemi Covid-19 pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara terbesar kedua sebanyak Rp280 triliun pada 2019, setelah industri minyak sawit (Eksa, 2021). Perolehan devisa dari pariwisata memberikan dampak ekonomi yang besar karena industri ini membuka peluang berkembangnya industri lain, seperti transportasi, hotel, restoran hingga UMKM. Sejak berlangsungnya pandemi Covid-19 hingga saat ini, devisa negara dari sektor pariwisata tahun 2020 turun hingga 80 persen menjadi US\$3,54 miliar dari tahun sebelumnya, di 2019 yang mencapai US\$16,9 miliar (CNN Indonesia, 2021).

Yogyakarta yang menyandang predikat sebagai kota pariwisata juga sangat terdampak pandemi Covid-19. Industri pariwisata di Yogyakarta mengalami kerugian hingga Rp10 triliun akibat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun (Pangaribowo, 2021a). Industri pariwisata sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Adanya aturan pembatasan mobilitas sosial memengaruhi kunjungan wisatawan dan TPK hotel. Selama pembatasan, okupansi hotel di Yogyakarta rata-rata di bawah 10 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemulihan pariwisata Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19? Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif mampu mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell, 2016: 4). Teknik pemilihan informan ditentukan secara *purposive sampling* sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui upaya pemulihan pariwisata Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19. Pengumpulan data di daerah melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan *stakeholders* lain yang terkait, seperti Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dispar DIY), Dinas Kesehatan Provinsi DIY (Dinkes DIY), Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, akademisi dari Pusat Kajian Pariwisata UGM, pegawai hotel, dan wisatawan. Sementara teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai penelitian selesai. Tiga tahapan analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992: 16).

Penelitian dilakukan di Yogyakarta pada tahun 2020 oleh Tim Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Penelitian tentang

pemulihan pariwisata sudah banyak dilakukan. Karena itu, penelitian ini fokus pada pemulihan pariwisata pada masa pandemi Covid-19 yang mulai berlangsung bulan Maret 2020 hingga kini. Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan kegiatan pariwisata. Pandemi Covid-19 yang diikuti pembatasan mobilitas masyarakat telah menurunkan pendapatan secara signifikan dari sektor pariwisata. Sementara sebagai daerah tujuan wisata kedua di Indonesia setelah Bali, pariwisata Yogyakarta memiliki pengaruh yang besar bagi perekonomian masyarakat. Berawal dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji upaya pemulihan pariwisata Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19.

Konsep Pariwisata

Cooper, Fletcher, Gilbert, & Wanhill (1993) mendefinisikan pariwisata sebagai rangkaian kegiatan berupa perjalanan sementara ke tempat tujuan tertentu di luar rumah atau tempat kerja, tinggal sementara di tempat tujuan dan menikmati fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Lebih lanjut Leiper (1990: 22–23) mengungkapkan kegiatan wisata terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: *pertama*, wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.

Kedua, elemen geografi, di mana pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi, yaitu:

- 1) Daerah asal wisatawan, tempat wisatawan melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur, dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari daerah asal wisatawan, seseorang dapat mencari informasi tentang objek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.

- 2) Daerah transit. Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan daerah transit juga penting. Sering kali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan.
- 3) Daerah tujuan wisata atau ujung tombak pariwisata. Daerah tujuan wisata merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari daerah asal wisatawan. Daerah tujuan wisata juga merupakan alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan.

Ketiga, industri pariwisata, yakni industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri pariwisata tersebar di ketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata dapat ditemukan di daerah asal wisatawan, pengembangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai macam hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Adapun tujuan kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan.

Komponen utama dalam pengembangan destinasi wisata menurut Cooper *et al.* (1993) adalah *pertama*, *attraction* (daya tarik wisata) yaitu komponen yang signifikan dalam menarik kedatangan wisatawan. Daya tarik wisata meliputi daya tarik berbasis alam, seperti gunung, bukit, atau

pantai; atraksi wisata budaya, seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni dan kerajinan, ritual, festival, atau kehidupan sehari-hari masyarakat; serta atraksi buatan, seperti acara olahraga atau pameran (Suwena & Widyatmaja, 2010: 88).

Kedua, *accessibility* yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi. Menurut French (1996, dalam Sunaryo, 2013), faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata, dan perangkat lainnya.

Ketiga, *amenities* (amenitas), yaitu fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata, seperti tempat penginapan, restoran, tempat hiburan maupun tempat perbelanjaan wisatawan.

Keempat, *ancillary service* (fasilitas umum) merupakan ketersediaan fasilitas umum yang digunakan oleh wisatawan dan mendukung terselenggaranya kegiatan wisata, seperti bank, ATM, telekomunikasi, rumah sakit, dan sebagainya (Sunaryo, 2013: 159). *Ancillary service* juga mencakup keberadaan berbagai organisasi untuk memfasilitasi serta mendorong pengembangan dan pemasaran kepariwisataan destinasi yang bersangkutan.

Kelima, *institutions* (kelembagaan) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata. Secara umum, lembaga pendukung kegiatan pariwisata terdiri dari tiga pilar utama, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. Ketiga unsur ini menggerakkan sistem pariwisata (Pitana & Gayatri, 2005: 97).

Pemulihan Bencana Covid-19 dan Pariwisata

Bencana diartikan sebagai kejadian alam, buatan manusia, atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidup-

an (Priambodo, 2009: 22). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengelompokkan bencana menjadi tiga jenis, yaitu: bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Berdasarkan pemahaman tersebut maka pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai bencana nonalam. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional juga mendukung bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional nonalam.

Bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 telah berdampak pada peningkatan jumlah korban, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 harus segera ditangani. Pemulihan bencana menurut Coppola (2007: 299) diartikan sebagai *“the emergency management function by which country, communities, families, and individual repairs, reconstruct, or regain what has lost as a result on disaster”*. Sejalan dengan pemahaman tersebut, Haas, Kates, dan Bowden (1977, dalam Herdiana, 2020: 7) menyatakan bahwa *“recovery was predictable, made up of identifiable parts occurring in a sequential manner; choices and decisions were value driven and outcomes emphasized a return to normalcy or the incorporation of those actions that have become more recently associated with sustainability”*. Dengan demikian, pemulihan bencana Covid-19 merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi ke awal atau semula sebelum adanya bencana.

Apabila dikaitkan dengan pariwisata, pemulihan pariwisata juga dimaksudkan sebagai upaya mengembalikan pariwisata ke kondisi awal sebelum ada pandemi Covid-19. Kemenparekraf/Baparekraf menyatakan bahwa terdapat tiga fase untuk menyelamatkan pariwisata akibat pandemi Covid-19, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Fase tanggap daru-

rat difokuskan pada kesehatan, seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas, melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata, serta melakukan persiapan pemulihan. Fase pemulihan dilakukan pada saat pembukaan secara bertahap tempat wisata. Adapun persiapannya mulai dari penerapan protokol *cleanliness* (kebersihan), *health* (kesehatan), *safety* (keamanan), dan *environment* (ramah lingkungan) (CHSE) di tempat wisata hingga mendukung optimalisasi kegiatan *meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE). Sementara fase normalisasi adalah persiapan destinasi dengan protokol CHSE, meningkatkan minat pasar, hingga diskon untuk paket wisata dan MICE (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021a).

Dalam pelaksanaan ketiga fase tersebut, kunci utama pemulihan pariwisata meliputi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi berkaitan dengan perubahan mendasar yang harus diupayakan. Inovasi harus dilakukan dari segi infrastruktur, kelembagaan, budaya, kuliner hingga fesyen yang berkaitan dengan pariwisata. Adaptasi berarti menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sementara kolaborasi adalah semua pihak harus bekerja sama dan bersinergi untuk mengembalikan kondisi pariwisata seperti sebelum Covid-19.

Kondisi Pariwisata DIY Selama Pandemi Covid-19

Pariwisata merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian Yogyakarta. Industri pariwisata dan penunjangnya memiliki kontribusi 55,37 persen terhadap perekonomian di Yogyakarta. Kehadiran Covid-19 telah memberikan dampak kerugian bagi berbagai sektor termasuk pariwisata. Sektor pariwisata menjadi sektor yang dinilai paling parah terdampak pada masa pandemi Covid-19. Hampir di seluruh wilayah, industri pariwisata mengalami penurunan jumlah pengunjung secara

tajam, tidak terkecuali daerah tujuan wisata budaya dan sejarah seperti Yogyakarta.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan jumlah kunjungan ke destinasi wisata terutama di Yogyakarta mengalami penurunan secara signifikan. Berbagai aturan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 mulai dari PSBB, PPKM darurat hingga PPKM level 4 membatasi mobilitas masyarakat. Sementara kunci utama pariwisata adalah pergerakan manusia. Dispar DIY mencatat estimasi kerugian sektor pariwisata di Yogyakarta pada awal pandemi Covid-19 hampir menyentuh angka Rp81 miliar. Angka tersebut berasal dari pendataan Dispar DIY yang dimulai sejak bulan Maret 2020 hingga 16 April 2020. Sementara dari 15 jenis usaha pariwisata, 776 usaha jasa pariwisata baik dalam bentuk formal maupun informal terdampak Covid-19. Terdapat puluhan ribu tenaga kerja yang terdiri dari 15 ribu karyawan dirumahkan dan 76 di-PHK (Tim Detik.com, 2020).

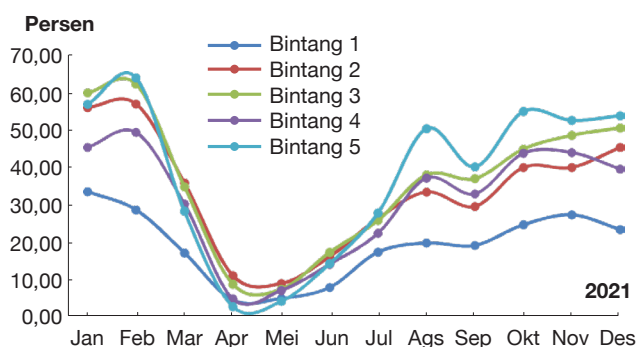
Selama kurun waktu 2020, jumlah orang yang menginap di hotel mengalami penurunan. Total hotel di DIY sebanyak 172 hotel bintang dan 1.951 hotel nonbintang. Tahun 2019, orang yang menginap di hotel sebesar 9 juta orang dan tahun 2020 turun menjadi 3,2 juta orang sehingga terjadi penurunan sebesar 64,37 persen. Wisatawan domestik mendominasi jumlah orang yang menginap di hotel, yakni sebesar 3,2 juta orang. Sementara wisman yang menginap di hotel berjumlah 42,8

ribu orang (Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta [BPS DIY, 2021: 9).

Grafik 1 menunjukkan TPK hotel di DIY selama tahun 2020. Sejak bulan Maret 2020, TPK hotel bintang menurun tajam dan mencapai titik terendah pada bulan April 2020. Hal ini disebabkan bulan Maret 2020, pertama kali pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nonalam yang bersifat nasional diikuti berbagai kebijakan pembatasan sosial. Dampaknya, wisatawan banyak yang membatalkan perjalanan wisatanya termasuk rencana menginap di hotel Yogyakarta.

Memasuki bulan Januari 2021, sejumlah tempat wisata masih ditutup karena kasus terkonfirmasi Covid-19 masih terus meningkat. Begitu juga dengan TPK hotel di Yogyakarta rata-rata masih di bawah 10 persen (Ikhsan, 2021). Meskipun jumlah wisman yang berwisata ke Yogyakarta masih belum sepenuhnya pulih, namun berbagai indikator menunjukkan pertumbuhan positif dari wisatawan domestik. Hal tersebut terlihat dari jumlah wisatawan domestik yang mendominasi hotel bintang di Yogyakarta. TPK hotel menjadi gambaran produktivitas usaha jasa akomodasi. BPS DIY mencatat pada Februari hingga Maret 2021 TPK hotel bintang mengalami kenaikan. Pada Februari 2021, TPK hotel bintang mencapai rata-rata 26,87 persen atau naik 1,96 poin dibandingkan TPK Januari 2021 yang tercatat 24,91 persen (BPS DIY, 2021a: 1). Sementara Maret 2021 sebesar 40,42 persen, mengalami kenaikan lagi sebesar 13,55 poin dibandingkan TPK Februari 2021 (BPS DIY, 2021b: 3). Bulan April hingga Agustus 2021, TPK hotel kembali menurun seiring dengan kebijakan pelarangan mudik lebaran yang diikuti PPKM hingga level 4.

Di satu sisi, aturan pelarangan mudik lebaran dan PPKM untuk mencegah penyebaran Covid-19, namun di sisi lain menyebabkan penurunan pendapatan usaha pariwisata. Setelah bertahan selama satu tahun pada masa pandemi Covid-19, sebanyak 53 usaha jasa wisata yang terdi-



Grafik 1. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Menurut Kelas DIY 2020

Sumber: BPS DIY, 2021: 17

ri dari 32 hotel dan 21 restoran di Yogyakarta tutup permanen, sedangkan 100 lainnya memilih menutup sementara usahanya. Dari jumlah tersebut tidak hanya hotel melati yang tutup permanen tetapi hotel bintang juga tidak mampu membiayai biaya operasional setiap bulannya. Situasi pandemi Covid-19 menyebabkan usaha jasa wisata sulit bertahan. Libur lebaran yang diharapkan mampu meningkatkan TPK hotel ternyata hanya berada di angka 5 sampai 7 persen (Pangaribowo, 2021b). Demikian juga PPKM telah memaksa pemerintah daerah (pemda) menutup destinasi wisata yang hingga kini masih belum ada kejelasan waktu dibukanya destinasi wisata.

Dari penjelasan tersebut, pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata setidaknya berpengaruh pada beberapa risiko ekonomi berikut: (1) penutupan sementara hotel, restoran, dan industri pariwisata lain; (2) pengurangan karyawan, cuti tidak dibayar, atau PHK; (3) kesulitan likuiditas seperti gagal bayar kredit investasi dan modal kerja; serta (4) penutupan usaha secara permanen (Sambodo, 2020, dalam Pambudi, Masteriarsa, Wibowo, & Amaliyah, 2020: 4).

Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19

Selama masa pandemi Covid-19, Dispar DIY melakukan strategi dan mitigasi yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Tahap tanggap darurat dititikberatkan pada keselamatan manusia yang dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2020. Pada masa ini kasus Covid-19 sedang meningkat tajam. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan PSBB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan ini mengatur pembatasan aktivitas di luar rumah termasuk sekolah, kerja, keagamaan, peng-

gunaan moda transportasi, dan kegiatan di tempat umum. Namun demikian, Pemda DIY tidak menerapkan kebijakan PSBB karena belum ada data penularan Covid-19 melalui transmisi lokal secara masif. Selain itu, dilihat dari pergerakan masyarakat saat itu, masyarakat Yogyakarta masih memiliki modal sosial kesadaran diri dan upaya gotong-royong dalam menghadapi bencana seperti saat mengatasi bencana-bencana terdahulu.

Pada tanggal 1 April 2020, Gubernur DIY menetapkan status tanggap darurat yang pertama. Meskipun saat itu belum menerapkan kebijakan PSBB, namun Yogyakarta juga terkena imbas dari kebijakan PSBB yang berlaku di daerah lain. PSBB membatasi mobilitas masyarakat ke luar daerahnya. Hal ini memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta. Penurunan jumlah wisatawan tidak terelakkan. Tempat wisata mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Bahkan, sejumlah hotel harus tutup sementara karena tingkat hunian kamar hotel menurun sehingga biaya operasional hotel tidak sebanding dengan pemasukan hotel. Saat operasional berhenti, maka sejumlah pekerja di industri pariwisata terpaksa dirumahkan. Akibatnya, pendapatan dari sektor pariwisata menurun pada triwulan I tahun 2020.

Pemda mempersiapkan upaya pemulihan pariwisata. Pemda menunda semua kegiatan dan merealokasi anggaran ke program mitigasi, melakukan identifikasi dampak pada bidang pariwisata dan ekraf dengan membentuk tim kajian internal. Tim ini melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menda-ta dampak pariwisata akibat Covid-19. Pendekatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat adalah *matching fund*.

Dispar DIY kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kemenparekraf untuk memberikan relaksasi bagi pelaku usaha pariwisata yang terdampak akibat Covid-19 (Dispar DIY, 2020). Pemda

mendukung implementasi stimulus fiskal dan nonfiskal serta pelonggaran monev dan perbankan yang diberikan kepada pelaku ekonomi di Yogyakarta secara optimal. Pemda juga berupaya mengoptimalkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi para pelaku ekonomi termasuk pelaku usaha pariwisata. Program PEN bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp397,6 triliun untuk kepentingan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (*public goods*). Sementara, untuk UMKM, korporasi, non-UMKM, dan non-*public goods* lainnya sebesar Rp505,6 triliun. Program PEN mempertemukan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya usaha UMKM dengan perbankan (HIMBARA) dan BPD. Dengan demikian, para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif bisa mendapatkan informasi sekaligus *coaching clinic* terkait cara memanfaatkan program stimulus PEN agar usahanya dapat bangkit kembali. Selain itu, diharapkan para pelaku usaha khususnya UMKM dapat memanfaatkan secara maksimal program yang disiapkan pemerintah sebagai stimulus bantuan dalam bentuk modal kerja bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19.

Pada masa tanggap darurat, inovasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi digital. Dispar DIY bersama Bank Indonesia (BI) mempersiapkan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan teknologi digital. Kondisi yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak dan menghindari kerumunan perlu direspons pelaku wisata secara cepat dan tepat. Teknologi digital dalam pariwisata diupayakan untuk mendukung kegiatan

pariwisata pada masa pandemi Covid-19. Dasar percepatan pemulihan pariwisata diarahkan pada inovasi segmen sasaran, paket wisata, produk atraksi, aksesibilitas dan aktivitas yang sesuai dengan kondisi saat pandemi.

Mulai bulan Juni 2020, fase tanggap darurat ditingkatkan fokusnya pada pemulihan ekonomi lokal termasuk pariwisata. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP) pariwisata. Dinkes DIY bersama pemerintah kabupaten/kota dengan difasilitasi oleh Dispar DIY melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha wisata. Koordinasi terkait kesiapan industri pariwisata dalam menghadapi pandemi, termasuk pembuatan SOP dan peninjauan lapangan pada beberapa industri pariwisata. Dalam koordinasi, peran Dinkes mengedukasi bagaimana pencegahan transmisi Covid-19 melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat, promosi protokol kesehatan, dan penilaian sarana pendukung pencegahan penyakit menular di industri pariwisata (Dinkes DIY, 2020).

Selanjutnya, SOP disusun berdasarkan usulan pengajuan pelaku usaha dan industri pariwisata kepada Dispar DIY. Dispar DIY kemudian mengajukan kepada gubernur dan gubernur akan menerbitkan peraturan SOP berdasarkan keputusan bersama. SOP tentang protokol kesehatan tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Terkait hal ini, GIPI DIY bekerja sama dengan Dinkes dan Dispar DIY berperan dalam melakukan pendampingan proses sosialisasi di setiap destinasi wisata. Sosialisasi mencakup simulasi di tempat wisata, pemberian penyuluhan protokol kesehatan, pembekalan, peninjauan langsung, dan penilaian kesiapan pembukaan industri pariwisata. Ketika pemerintah kabupaten/kota menyatakan siap untuk membuka destinasi wisata, maka wisata akan dibuka untuk

umum. Industri dan tempat wisata harus terkoneksi dengan puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Di Yogyakarta, pihak puskesmas tidak dapat selalu berada di lokasi wisata karena keterbatasan tenaga. Namun demikian, apabila terdapat laporan kejadian Covid-19 di lokasi wisata dari gugus tugas, maka puskesmas akan mengerahkan ambulans ke lokasi tersebut. Selanjutnya dinkes kabupaten/kota bersama puskesmas melakukan pelacakan kasus tersebut. Apabila ada kabupaten/kota kekurangan sumber daya, maka pemerintah provinsi harus membantu menyediakan sumber daya terkait.

Sosialisasi protokol kesehatan di industri pariwisata diikuti dengan meningkatkan penerapan CHSE pada kegiatan pariwisata. Penerapan CHSE disertai dengan informasi yang jelas bagi setiap wisatawan terkait jaminan, hak-hak konsumen hingga prosedur jika terjadi gejala kasus Covid-19. Untuk mendukung hal ini, Dinkes DIY bekerja sama dengan pelaku wisata dan difasilitasi Dispar DIY aktif melakukan sosialisasi agar semua pihak memiliki kesamaan gerak dalam penerapan protokol kesehatan dan keselamatan. Pada masa pandemi Covid-19, pariwisata mengedepankan aspek manusia, pelayanan dengan empati, mengingat Covid-19 telah mengubah banyak perilaku masyarakat (Dispar DIY, 2020).

Pemda memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana di berbagai titik destinasi wisata guna mendukung protokol kesehatan seperti fasilitas cuci tangan. Selain itu, promosi pariwisata mulai dilakukan melalui video atau sarana lainnya. Namun demikian, konten promosi belum berisi ajakan untuk mengunjungi Yogyakarta. Promosi wisata lebih diarahkan pada kesiapan Yogyakarta dalam pariwisata sehingga wisatawan yang akan berkunjung merasa aman dan nyaman. Pilihan destinasi yang banyak merupakan preferensi utama wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Ada perbedaan preferensi antargenerasi. Preferensi terhadap lingkung-

an bersih dan nyaman serta higienis meningkat sesudah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah memaksa orang untuk mengubah perilakunya dengan hidup bersih dan sehat. Hal ini juga berlaku untuk sektor pariwisata. Wisatawan berharap pelaku usaha pariwisata di Yogyakarta dapat memberikan porsi prioritas terhadap kebersihan destinasi wisata. Dengan demikian, pariwisata pada era *new normal* lebih mengedepankan *quality tourism* dimana wisatawan lebih memilih destinasi wisata yang berkualitas.

Menurut Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Aji, kriteria *quality tourism* di antaranya memenuhi standar CHSE (GIPI DIY, 2020). Selain itu, sektor pariwisata juga membutuhkan *refresh product* dengan memperhatikan apa yang diinginkan para wisatawan pada era *new normal*. Hal ini menjadi tugas para pengelola wisata untuk melihat keinginan dan kebutuhan para wisatawan pada era *new normal* dengan tetap menjunjung penerapan protokol kesehatan. Prioritas kedua adalah keamanan dan kenyamanan dalam berwisata, serta kemudahan akses menuju objek wisata. Harga murah bukan lagi menjadi prioritas utama untuk destinasi wisata Yogyakarta.

Dispar DIY kemudian menerapkan uji coba terbatas untuk 51 destinasi wisata. Ada dua strategi menyambut pelaksanaan uji coba terbatas pada sejumlah objek wisata. *Pertama* adalah pemulihan destinasi yang saat ini masih berlangsung hingga tahap evaluasi. Strategi *kedua* adalah pemulihan pasar yang mulai dilaksanakan. Selama uji coba terbatas, Dispar DIY fokus pada wisatawan asal Yogyakarta yang berkunjung ke destinasi wisata. Namun demikian, tidak ada pelarangan bagi wisatawan luar Yogyakarta yang akan berkunjung selama mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Adaptasi kebiasaan baru ini menjadi bagian yang dilaksanakan secara bertahap. Setelah kunjungan wisatawan lokal, akan dilakukan evaluasi. Apabila memungkinkan, destinasi wisata

akan dibuka untuk skala yang lebih luas seperti wisatawan dalam bentuk grup.

Untuk mendukung upaya pemulihan pariwisata, Pemda DIY juga mengembangkan inovasi digital berupa *Visiting Jogja* dan *Jogja Pass* (Dispar DIY, 21 Oktober 2020). *Visiting Jogja* yang dibangun atas hasil kerja sama BI dan Dispar DIY ini bertujuan untuk reaktivasi destinasi. *Visiting Jogja* adalah aplikasi reservasi destinasi wisata yang terintegrasi dengan sistem pembayaran nontunai QRIS. Dengan aplikasi ini, wisatawan dapat melakukan reservasi secara *online* untuk masuk destinasi wisata di Yogyakarta. Aplikasi menampilkan destinasi wisata mana saja yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Terdapat beragam menu yang bisa dipilih wisatawan, seperti lokasi wisata, akomodasi, kuliner, oleh-oleh, *event*, peta wisata, media sosial *Visiting Jogja* hingga cuaca terkini di empat kabupaten dan satu kota di DIY.

Sementara *Jogja Pass* yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) DIY merupakan sejenis identitas digital wisatawan ketika memasuki tempat-tempat wisata. *Jogja Pass* dapat digunakan untuk melakukan pengawasan pengunjung lewat ID seseorang yang telah mengunduh aplikasi tersebut. Selain itu, *Jogja Pass* dapat digunakan untuk melakukan *self screening* Covid-19 di tempat-tempat wisata. Aplikasi ini dapat memantau dan mendata wisatawan yang masuk ke lokasi wisata secara sistematis dan menyesuaikan dengan kapasitas lokasi wisata yang ingin dikunjungi. Apabila sudah mencapai kapasitas misalnya 50 persen (kapasitasnya), nanti akan ditutup secara otomatis karena sudah tersistem. Pengguna *Jogja Pass* juga bisa mengecek sendiri peta sebaran lokasi mengenai tempat keramaian, seperti tempat wisata, mal, dan area publik yang ingin dikunjungi. Selain itu, juga memiliki *emergency call* yang berguna dalam kondisi mendesak. Pengguna dapat menghubungi kontak darurat atau rumah sakit terdekat dari

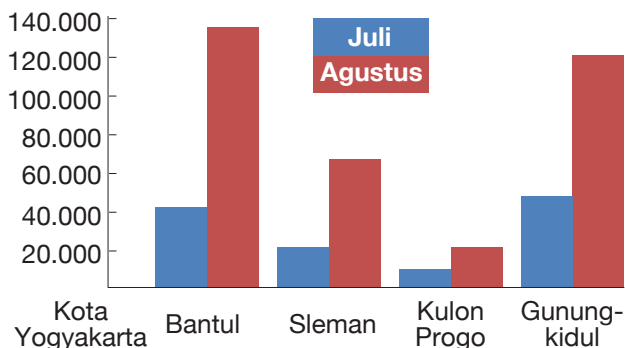
posisinya. Dari kedua aplikasi tersebut, diperoleh data bahwa mulai bulan Juli sampai dengan November 2020, total wisatawan yang datang ke DIY sekitar 1,67 juta.

Selanjutnya Dispar DIY bersama BI DIY, GIPI DIY, dan pelaku pariwisata lainnya berkolaborasi dan bersinergi untuk mendorong percepatan pemulihan pariwisata DIY. Kolaborasi tersebut menghasilkan program Sinergi Pariwisata Ngayogyakarta (SIWIG-NYO). Program dibagi dalam tiga strategi, yaitu strategi penyesuaian menuju pariwisata *new normal*, strategi percepatan untuk mempercepat upaya pemulihan pariwisata, dan strategi adaptasi untuk beradaptasi dan menjaga pariwisata Yogyakarta lebih berkelanjutan. Program yang telah diimplementasikan adalah kajian strategi pariwisata menuju kebiasaan baru, webinar *series* (pelatihan) untuk pelaku pariwisata, sosialisasi SOP protokol kesehatan, implementasi QRIS destinasi pariwisata, dan pengembangan aplikasi pendukung pariwisata (Dispar DIY, 2020).

Dukungan BI DIY bagi pemulihan pariwisata di Yogyakarta menuju *new normal* juga diwujudkan melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). BI DIY memberikan alat kesehatan dalam rangka pengkondisian 7 (tujuh) destinasi wisata dan 1 glamping untuk mendukung kegiatan pariwisata *new normal*. Selain itu, BI DIY bekerja sama dengan Dispar DIY telah menerbitkan buku "*Pranatan Anyar Plesiran Jogja*" (Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru). Pedoman ini merupakan salah satu bentuk respons cepat Dispar DIY untuk mengupayakan agar roda perekonomian di Yogyakarta tetap berjalan sesuai protokol berbasis CHSE di masa *new normal*. Buku pedoman ini juga merupakan tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di D.I. Yogyakarta dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Berbagai upaya yang dilakukan pemda dan para pelaku usaha dan industri wisata

berhasil meningkatkan aktivitas pariwisata. Jumlah wisatawan mulai merangkak naik seiring kepercayaan mereka akan penerapan protokol kesehatan di Yogyakarta yang berbasis CHSE. Memasuki bulan Juni 2020, jumlah kunjungan wisman ke wilayah Yogyakarta mengalami kenaikan dibandingkan pada saat awal pandemi. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Juni 2019 jumlah tersebut masih menunjukkan penurunan sampai 99,89 persen. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan setiap pekannya. Peningkatan kunjungan wisatawan terjadi awal Juli 2020 dan puncaknya pada bulan Agustus 2020 dengan jumlah wisatawan hampir 40 ribu orang yang mengunjungi 41 destinasi wisata di Yogyakarta. Kunjungan wisatawan dari luar Yogyakarta mencapai 53 persen. Sementara itu, jumlah kedatangan penumpang melalui Bandara Adisutjipto dan Bandara Internasional Yogyakarta pada bulan Juni sebesar 26.921 orang (BPS DIY, 2021).



Grafik 1. Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata Berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber: Bank Indonesia, DIY, 2020

Grafik 1 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mengalami peningkatan signifikan selama kurun waktu satu bulan, yaitu bulan Juli ke bulan Agustus 2020. Kunjungan masih didominasi oleh wisatawan lokal karena fokus pemulihan pariwisata sementara masih segmen domestik. Adapun total kunjungan pada Agustus 2020 mencapai 344.468 pengunjung. Kunjungan wisatawan objek daya tarik

wisata ini telah mencapai 24 persen dari kondisi normal tahun sebelumnya.

TPK hotel juga mengalami peningkatan. Pada bulan Mei 2020, jumlah orang yang menginap di hotel bintang mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini seiring kebijakan pemerintah untuk aktif melakukan promosi wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan di tengah pandemi Covid-19. TPK hotel terus meningkat hingga bulan Desember 2020, meskipun sempat mengalami penurunan pada September 2020. Tingginya biaya operasional hotel yang tidak sebanding dengan pendapatan hotel diindikasikan menjadi penyebabnya.

Pembukaan tempat wisata secara bertahap dan peningkatan jumlah kunjungan wisata dijalankan dengan pengawasan yang lebih ketat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dengan Korem dan Polda rutin melakukan sidak kunjungan ke tempat wisata dan industri wisata. Menurut data dari Satpol PP DIY, selama September 2020, pelanggaran protokol kesehatan terjadi di 234 tempat usaha, yang terdiri atas 133 restoran, 67 hotel, 12 tempat hiburan, dan 31 tempat wisata. Sebagian pelaku usaha masuk pembinaan Satpol PP DIY (Raharjo, 2020). Menurunnya kedisiplinan masyarakat membuka peluang peningkatan sanksi sosial menjadi sanksi denda. Selama ini sanksi sosial ditegakkan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pengendalian Covid-19.

Pemda mulai melakukan inovasi dalam rangka promosi wisata Yogyakarta pada bulan Desember 2020. Pemanfaatan teknologi digital kembali dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akan kondisi wisata di Yogyakarta saat itu. Promosi wisata dikenal dengan *virtual tour*. *Virtual tour* dikembangkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan dapat diakses melalui akun YouTube Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dengan mengakses video *virtual tour* 360 tersebut, wisatawan dapat mengetahui gambaran terkini kondisi Yog-

yakarta khususnya fasilitas pendukung pariwisata, seperti bandara, stasiun kereta api, akomodasi hotel, dan *homestay*. Selain itu, dalam *virtual tour* juga disajikan video penerapan protokol kesehatan yang wajib diikuti wisatawan saat berkunjung (Tim Priangan Timur News 1, 2020). Satu hal yang penting dalam memasarkan pariwisata adalah jaminan kesehatan dan keamanan bagi wisatawan yang akan berkunjung. Selain itu, pariwisata yang berkualitas masih menjadi pilihan yang tepat dalam menjawab tuntutan pergeseran preferensi wisata saat ini.

Memasuki tahun 2021, pandemi Covid-19 masih berlangsung. Kasus terkonfirmasi Covid-19 terus meningkat. Oleh karena itu, upaya pemulihan pariwisata masih berada pada fase tanggap darurat. Sejumlah destinasi wisata telah dibuka dengan protokol kesehatan ketat berbasis CHSE. Dispar DIY berkolaborasi dengan Kemenparekraf/Baparekraf menggelar acara *Jogja Business Matching* pada bulan Februari 2021. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan para pelaku usaha wisata, seperti hotel, agen perjalanan, pengelola objek wisata, pusat oleh-oleh, badan promosi pariwisata, dengan wisatawan di Yogyakarta. *Jogja Business Matching* diikuti dengan kegiatan *famtrip* di berbagai objek wisata di Yogyakarta sebagai upaya untuk mendorong promosi destinasi wisata di Yogyakarta melalui konsep *local tourism* dan *media exposure* (new2.id, 2021). *Jogja Business Matching* diselenggarakan melalui aplikasi *zoom meeting* dan disiarkan secara *live streaming*.

Selanjutnya bulan Maret 2021, pemda melalui Dispar DIY meluncurkan *Calender of Event* (CoE) 2021. Peluncuran kegiatan pariwisata tersebut untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait kegiatan pariwisata di Yogyakarta sekaligus menunjukkan bahwa pariwisata Yogyakarta tidak boleh berhenti di tengah pandemi Covid-19. Terdapat 71 kegiatan wisata dan budaya selama tahun 2021. Ke-71 kegiatan yang dirangkum dalam CoE DIY 2021

tersebut dibagi ke dalam delapan kategori kegiatan dan terpilih 34 kegiatan ikonik yang mengedepankan dan mengunggulkan kegiatan budaya dan pariwisata bertaraf nasional maupun internasional. Adapun rincian kegiatan dan acara tersebut adalah 7 kegiatan pariwisata olahraga, 3 acara musik, 12 festival, 26 acara budaya, 8 kegiatan pameran, 4 parade, 6 kompetisi, dan 5 kegiatan seminar. Acara dan kegiatan tersebut dilaksanakan menyebar di kabupaten/kota dan diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat (Hasanudin, 2021).

Pemda bersama pelaku usaha wisata terus berupaya memulihkan pariwisata Yogyakarta. Inovasi lain untuk memulihkan pariwisata dilakukan melalui program *travel corridor arrangement* (TAC) untuk membuka kembali pariwisata bekerja sama dengan daerah atau negara lain di tengah kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Program TAC ini diuji coba kepada wisatawan domestik terlebih dahulu. Paket-paket wisata yang ditawarkan berupa *Yogya One Day Tour* dan *Yogya 2D1N tour* termasuk paket wisata sumbu filosofi yang akan memberikan ruang di ruang publik beserta pengalaman tidak terlupakan. Meskipun aktivitas pariwisata sudah mulai digerakkan, wisatawan harus tetap diberikan jaminan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 melalui protokol kesehatan ketat. Selain harus terverifikasi protokol kesehatan yang ketat (CHSE), sarana prasarana pendukung juga harus dipersiapkan.

Dalam perkembangannya, jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan. Pada bulan Maret 2021 tepatnya ketika libur panjang, kunjungan wisatawan menyentuh angka 31 ribu orang. Kemudian libur lebaran yang jatuh pada bulan Mei 2021 juga meningkatkan kunjungan wisatawan hingga mencapai angka 117 ribu orang. Pengunjung didominasi wisatawan lokal. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap wisata di Yogyakarta sudah mulai kembali. Di samping

kejenuhan masyarakat akibat terlalu lama beraktivitas di rumah, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pelaku usaha wisata juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan untuk berwisata.

Peningkatan kasus positif Covid-19 memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM dengan berbagai aturan di dalamnya. Yogyakarta termasuk daerah yang menerapkan PPKM hingga level 4. Dengan kebijakan tersebut, seluruh destinasi wisata ditutup sejak 3 Juli 2021. Untuk menggerakkan kembali pariwisata di tengah PPKM, pemerintah mendorong percepatan program vaksinasi bagi pelaku usaha wisata. Melalui vaksinasi massif tersebut diharapkan dapat menciptakan kekebalan atau imunitas kelompok, selain menumbuhkan kembali kepercayaan wisatawan.

Kunci keberhasilan dari upaya pemulihan pariwisata adalah akses dan komunikasi antara pelaku usaha dan industri pariwisata dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus dapat menjaga agar isu-isu keamanan tidak memengaruhi industri pariwisata. Selain itu, *monitoring* dan evaluasi penegakan hukum terkait penerapan protokol kesehatan juga mendukung upaya pemulihan pariwisata. Berbagai upaya yang dilakukan pemda maupun pelaku usaha wisata mulai membangkitkan kembali usaha dan industri pariwisata di Yogyakarta. Meskipun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kontribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah jauh menurun, namun sedikit demi sedikit pariwisata Yogyakarta mulai menunjukkan kemajuan. Selama pandemi Covid-19, Yogyakarta menempati peringkat pertama daerah di Pulau Jawa dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi. Menyusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Titik favorit wisatawan adalah wisata alam seperti Hutan Pinus Pengger, Pantai Baron, Pantai Parangtritis, Tebing Breksi, dan Puncak Becici. Jumlah objek wisata di Yogyakarta yang terdata dari tahun 2019–2020 berjumlah 215 yang meliputi objek wisata alam,

objek wisata budaya, objek wisata buatan, dan desa wisata. Kunjungan wisman ke objek wisata tersebut sebanyak 551.547 orang, sedangkan wisatawan domestik mencapai 27.772.847 orang sehingga total mencapai 28.324.394 orang (Wicaksono, 2020).

Penutup

Pariwisata merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian Yogyakarta. Kehadiran Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial memengaruhi pergerakan wisatawan. Akibatnya, sektor pariwisata mengalami kerugian. Jumlah kunjungan wisatawan dan TPK hotel menurun diikuti penutupan sementara maupun permanen sejumlah hotel dan restoran. Pekerja di industri pariwisata banyak yang dirumahkan. Upaya pemulihan pariwisata dilakukan melalui tiga fase, yakni tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Sampai saat ini, pemulihan pariwisata Yogyakarta masih berada pada fase tanggap darurat karena pemerintah belum menyatakan pandemi Covid-19 berakhir. Fase tanggap darurat diawali dengan pendekatan *matching fund* di mana pemda merealokasi anggaran ke program mitigasi, melakukan identifikasi dampak pada pariwisata dengan membentuk tim kajian internal, dan berkoordinasi dengan Kememparekraf untuk memberikan relaksasi bagi pelaku usaha wisata yang terdampak Covid-19.

Tiga strategi untuk mempercepat pemulihan pariwisata Yogyakarta dilakukan melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi pengembangan teknologi digital melalui *Visiting Jogja* dan *Jogja Pass*, inovasi kelembagaan dengan Sinergi Wisata Ngayogyakarta, inovasi pemasaran dengan optimalisasi promosi pariwisata *new normal* Yogyakarta, *virtual tour*, *event tourism*, *business matching*, dan *travel corridor arrangement*, serta inovasi produk melalui pengembangan atraksi, amenitas dan akses wisata yang sesuai

dengan kondisi pandemi Covid-19. Adaptasi dilakukan melalui *communication campaign* protokol kesehatan dan keselamatan serta implementasi CHSE pada destinasi dan industri wisata. Sementara kolaborasi dilakukan antara pemda, pemerintah pusat, pelaku usaha wisata, BI, dan swasta.

Berbagai upaya yang dilakukan seluruh pihak terkait mulai membangkitkan kembali pariwisata di Yogyakarta. Selama pandemi Covid-19, Yogyakarta menempati peringkat pertama daerah di Pulau Jawa dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi. Kunci dari keberhasilan upaya pemulihan pariwisata adalah akses dan komunikasi antara pemerintah dengan para pelaku wisata. Selain itu, kesiapan destinasi wisata dalam hal keamanan dan mitigasi bencana menjadi prioritas. Sebagai bagian dari fungsi pengawasannya, Komisi X DPR RI perlu melakukan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah guna memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan di industri pariwisata berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Anggarini, D. T. (2021). Upaya pemulihan industri pariwisata dalam situasi pandemi Covid-19. *Pariwisata*, 8(1), April, 22–31.
- Arnani, M. (2020, Maret 12). Jadi pandemi global, ini daftar 121 negara dan wilayah yang konfirmasi kasus virus corona. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/074100165/jadi-pandemi-global-ini-daftar-121-negara-dan-wilayah-yang-konfirmasi-kasus?page=1>, pada 26 Agustus 2020.
- Badan Pusat Statistik. (2021, Februari 1). Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Desember 2020. *Berita Resmi Statistik*. 11/02/Th.XXIV, 1 Februari 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2020, Agustus 3). Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Udara Daerah Istimewa Yogyakarta Juni 2020. *Berita Resmi Statistik No. 48/08/34/Th.XXII*. Diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/08/03/1010/perkembangan-pariwisata-dan-transportasi-udara-d-i--yogyakarta--juni-2020.htm>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2021a, April 1). Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Udara Daerah Istimewa Yogyakarta Februari 2021. *Berita Resmi Statistik No.26/04/34/Th.XXIII*, Diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/04/01/1118/perkembangan-pariwisata-dan-transportasi-udara-d-i--yogyakarta--februari-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2021b, Juni 2). Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Udara Daerah Istimewa Yogyakarta April 2021. *Berita Resmi Statistik No. 38/06/34/Th.XXIII*, Diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/06/02/1120/perkembangan-pariwisata-dan-transportasi-udara-daerah-istimewa-yogyakarta-april-2021.html>
- Bank Indonesia D.I. Yogyakarta. (2020). *Dampak pandemi terhadap perekonomian DIY*. [Makalah FGD]. Bappeda DIY, Yogyakarta.
- CNN Indonesia. (2021, April 28). Devisa pariwisata susut 80 persen jadi Rp51,2 T pada 2020. *CNNIndonesia.com*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210427144430-532-635395/devisa-pariwisata-susut-80-persen-jadi-rp512-t-pada-2020>, pada 5 September 2021.
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1993). *Tourism: Principles and practice*. London: Pitman Publishing.
- Coppola, D. P. (2007). *Introduction to international disaster management*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta. (2020, Oktober 23). *Upaya pemulihan pariwisata Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19*

- Tim peneliti bidang kesejahteraan sosial Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Kantor Dinas Kesehatan DIY.
- Dinas Pariwisata D.I. Yogyakarta. (2020, Oktober 21). *Upaya pemulihan pariwisata Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19*/ Tim peneliti bidang kesejahteraan sosial Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Kantor Dinas Pariwisata DIY.
- Eksha, A. S. (2021, Desember 10). Wajah baru pariwisata kala pandemi. *Detik.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-5289862/wajah-baru-pariwisata-kala-pandemi>, pada 5 September 2021.
- GIPI D.I. Yogyakarta. (2020, Oktober 22). *Upaya pemulihan pariwisata Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19*/Tim peneliti bidang kesejahteraan sosial Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Kantor GIPI DIY.
- Hasanudin, U. (2021, Maret 5). Pandemi, Pariwisata DIY Tidak Boleh Berhenti. *Harianjogja.com*. Diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/03/05/510/1065355/pandemi-pariwisata-diy-tidak-boleh-berhenti>, pada 6 September 2021.
- Herdiana, D. (2020). Rekomendasi kebijakan pemulihan pariwisata pasca wabah Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung. *JUMPA*, 7 (1), Juli: 1–30.
- Herman. (2021, Februari 1). Dampak pandemi, kunjungan wisman sepanjang 2020 anjlok 75%. *Beritasatu.com*. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/726461/dampak-pandemi-kunjungan-wisman-sepanjang-2020-anjlok-75>, pada 5 September 2021.
- Ikhsan, M. F. N. (2021, Juni 2). Genap setahun pembatasan penerbangan, ini data wisman ke DIY. *Bisnis.com*. Diakses dari <https://semarang.bisnis.com/read/20210602/535/1400514/genap-setahun-pembatasan-penerbangan-ini-data-wisman-ke-diy>, pada 7 September 2021.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2021a, Februari 8). Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020. Pusat Data dan Sistem Informasi Kemenparekraf/ Baparekraf. Diakses dari <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/Statistik-Kunjungan-Wisatawan-Mancanegara-2020>, pada 5 September 2021.
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2021b, Agustus 18). Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi. *kemenparekraf.go.id*. Diakses dari <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>, pada 5 September 2021.
- Kusumawardhani, A. (2021, April 1). Ini strategi PHRI tingkatkan hunian hotel tahun ini. *Bisnis.com*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210401/12/1375355/ini-strategi-phri-tingkatkan-hunian-hotel-tahun-ini>, pada 5 September 2021.
- Leiper, N. (1990). *Tourism system: an interdisciplinary perspective*. New Zealand: Department of Management System, Business Studies Faculty, Massey University.
- Lestari, R. (2021, Juni 30). Pariwisata global bakal merugi US\$2,4 Triliun tahun ini. *Bisnis.com*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210630/620/1411868/pariwisata-global-bakal-merugi-us24-triliun-tahun-ini>, pada 5 September 2021.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- News2.id. (2021, Februari 23). Dorong pergerakan ekonomi, kemenparekraf dukung jogja business matching. *News2.id*. Diakses dari <https://news2.id/dorong-pergerakan-ekonomi-kemenparekraf-dukung-jogja-business-matching/>, pada 7 September 2021.
- Pambudi, A. S., Masteriarsa, M. F., Wibowo, A. D. C., & Amaliyah, I. (2020). Strategi pemulihan ekonomi sektor pariwisata pasca Covid-19. *Majalah Media Perencana*, 1 (1), Oktober: 1–21.
- Pangaribowo, W. S. (2021a, Agustus 4). Industri pariwisata di Jogja rugi Rp 10 triliun selama pandemi. *Kompas.com*. Diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2021/08/04/123500027/industri->

pariwisata-di-jogja-rugi-rp-10-triliun-selama-pandemi?page=all, pada 5 September 2021.

- Pangaribowo, W. S. (2021b, Mei 5). 53 hotel dan restoran di DIY pilih tutup permanen karena covid-19. *Kompas.com*. Diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2021/05/22/153800327/53-hotel-dan-restoran-di-diy-pilih-tutup-permanen-karena-covid-19>, pada 5 September 2021.
- Pitana, I. G. & Gayatri, G. P. (2005). *Sosiologi pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Priambodo, S. A. (2009). *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purwanto, A. (2021, Agustus 23). Ekonomi dunia di masa pandemi covid-19: dari dampak hingga proyeksi pertumbuhan 2021-2022. *Kompas.id*. Diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-dunia-di-masa-pandemi-covid-19-dari-dampak-hingga-proyeksi-pertumbuhan-2021-2022>, diakses 5 September 2021.
- Raharjo, B. (2020, Oktober, 5). Satgas Covid DIY: Banyak pelaku usaha langgar prokes. *Republika.co.id*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qhpyd6415/satgas-covid-diy-banyak-pelaku-usaha-langgar-prokes>, pada 28 November 2020.
- Shelavie, T. (2021, September 3). Update Covid-19 Global 3 September 2021: Indonesia Urutan 16 Kasus Aktif Terbanyak Dunia. *Tribunnews.com*. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/corona/2021/09/03/update-covid-19-global-3-september-2021-indonesia-urutan-16-kasus-aktif-terbanyak-dunia>, pada 4 September 2021.
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon kebijakan: mitigasi dampak wabah covid-19 pada sektor pariwisata. *The Indonesian Journal of Development Planning, IV* (2), Juni: 191–206. doi: 10.36574/jpp.v4i2.113
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan destinasi pariwisata konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Susanto, V. Y. (2020, Januari 29). Sepanjang 2019, devisa sektor pariwisata mencapai Rp280 triliun. *Kontan.co.id*. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-devisa-sektor-pariwisata-mencapai-rp-280-triliun?page=all>, pada 23 September 2020.
- Suwena, I. K. & Widyatmaja, I. G. N. (2010). *Pengetahuan dasar ilmu pariwisata*. Bali: Udayana University Press.
- Tim Detik.com. (2020, April 23). Data efek virus corona ke wisata RI per 23 april 2020. *Detik.com*. Diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-4928546/data-efek-virus-corona-ke-wisata-ri-per-23-april-2020>, pada 24 September 2020.
- Tim Priangan Timur News 1. (2020, Desember 6). Kangen wisata yogyakarta, tonton aja vedio virtual tour 360. *Pikiran-rakyat.com*. Diakses dari <https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1221066344/kangen-wisata-yogyakarta-tonton-aja-vedio-virtual-tour-360>, pada 6 September 2021.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (2009).
- Wicaksono, P. (2020, Oktober 1). Darurat Covid-19 di Yogyakarta sampai 31 Oktober 2020: Jogja untuk Jogja. *Tempo.co*. Diakses dari <https://travel.tempo.co/read/1391838/darurat-covid-19-di-yogyakarta-sampai-31-oktober-2020-jogja-untuk-jogja/full&view=ok>, pada 30 Oktober 2020.